



## **Pola Kepemimpinan Sultanah Aceh dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan 1641-1699 M**

**Subkhana Adzim Baqi**

*Alumni UIN Sunan Ampel Surabaya*  
[subkhanaadzim@gmail.com](mailto:subkhanaadzim@gmail.com)

**Muhammad Ilham Aziz**

*Alumni UIN Sunan Ampel Surabaya*  
[m.ilham.aziz98@gmail.com](mailto:m.ilham.aziz98@gmail.com)

**Sri Windari**

*Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*  
[windarisri98@gmail.com](mailto:windarisri98@gmail.com)

Submitted: 30 November 2021	Revision Required: 28 Januari 2022	Published: 15 Juni 2022
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

### **Abstract**

This study aims to determine the leadership pattern applied by the Sultanah of Aceh in the development of science from 1641-1699 AD. The method used in this study is the historical method. The election of Sultanah Aceh in its historical reflection experienced turbulence between groups who opposed the ascension to the throne of leadership from the Sultanah of Aceh. So that in its development, starting from the leadership of Sultanah Tajul Alam until the time of Kamalat Shah, the opponents (Wujudiyah) continued to try to overthrow Sultanah's leadership in the kingdom of Aceh Darussalam. The results of this study indicate that the leadership pattern of Sultanah Aceh in the development of science in the first period showed a significant development, until the fourth period. Although actually the sultanah as the queen had high authority, the Sultanah still held consultations with the royal advisor who was then held by a

cleric, especially in determining an action or policy aimed at achieving progress towards the Aceh kingdom.

**Keywords:** *Leadership, Sultanah Aceh, Science.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kepemimpinan yang diterapkan oleh Sultanah Aceh dalam pengembangan ilmu pengetahuan 1641-1699 M. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Pemilihan Sultanah Aceh dalam refleksi historisnya mengalami pergolakan antara kelompok yang menentang kenaikan tahta kepemimpinan dari Sultanah Aceh. Sehingga pada perkembangannya, mulai dari masa kepemimpinan Sultanah Tajul Alam sampai masa Kamalat Syah kaum penentang (*Wujudiyah*) terus berusaha untuk menggulingkan kepemimpinan Sultanah di kerajaan Aceh Darussalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kepemimpinan Sultanah Aceh dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada periode pertama menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, sampai pada periode keempat. Meskipun sebenarnya sultanah sebagai ratu memiliki otoritas yang tinggi, namun Sultanah tetap melakukan musyawarah dengan penasihat kerajaan yang saat itu dijabat oleh seorang ulama, terutama dalam menentukan sebuah tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kemajuan terhadap kerajaan Aceh.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan, Sultanah Aceh, Ilmu pengetahuan.

### **PENDAHULUAN**

Aceh terletak di wilayah bagian utara Pulau Sumatera, tepatnya paling barat dari Kepulauan Nusantara. Wilayah ini berbatasan dengan Samudera Hindia dan Selat Malaka. Adapun demikian, dalam realitas sejarahnya Aceh menjadi tempat singgah para pedagang antar kepulauan di Indonesia dengan negara-negara Barat dan Timur Tengah. Melihat letak Aceh yang sangat strategis, orang-orang Eropa menginginkan Aceh menjadi daerah jajahannya. Kedatangan orang-orang Eropa ke Aceh bermula saat orang Portugis abad XV memiliki keinginan untuk mendapatkan hasil bumi yang relatif murah harganya (Said, Aceh Sepanjang Abad Jilid I, 1981). Aceh menjadi wilayah

yang menarik perhatian masyarakat Indonesia maupun internasional pada realitas sejarahnya.

Pada awal abad XVI, Portugis mulai mendominasi wilayah Aceh, dan mendirikan kantor dagang serta menempatkan pasukannya di Aru (Pulau Kampai), Pidie, Pase, Daya (Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu, 1997). Banyaknya negeri-negeri di Semenanjung Sumatera yang telah dikuasai oleh Portugis, menjadikan Ali Mughayat Syah yang saat itu menjadi seorang pemimpin di Kerajaan Darussalam bertekad untuk mengusir para penjajah dari seluruh daratan pantai Sumatera. Mulai dari Daya sampai ke Pulau Kampai, serangan-serangan sporadis dilakukan oleh Sultan Ali Mughayat Syah. Penyerangan yang dilakukan oleh Ali Mughayat Syah tidak membutuhkan waktu yang lama, dalam waktu singkat Sultan Ali Mughayat Syah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis yang saat itu mendominasi daerah pesisir Sumatera, terutama daerah Pedir, Pase, Aru, dan Daya (Hasjmy, 59 Tahun Aceh merdeka dibawah pemerintahan Ratu, 1977).

Berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam diproklamirkan secara langsung oleh Ali Mughayat Syah. Pada masa permulaan pemerintahan terjadi selisih paham terkait dengan berkuasanya Sultan Ali Mughayat Syah, sebagian sejarawan berpendapat bahwa Sultan Ali berkuasa pada tahun 1511 M (Hasjmy, 59 Tahun Aceh merdeka dibawah pemerintahan Ratu, 1977). Sementara Ahwan Mukarram dalam Sejarah Islam Indonesia 1 berpendapat bahwa Ali Mughayat Syah mulai berkuasa pada tahun 1497 M (Mukarrom, Sejarah Islam Indonesia 1, 2014). Pasca wafatnya Ali Mughayat Syah sampai masa Mohammad Daud Syah berakhir tahun 1903 M, jumlah para pemimpin kerajaan Aceh tercatat sebanyak 35 orang. Empat diantaranya adalah seorang perempuan yang berkuasa kurang lebih 59 tahun lamanya (Mukarrom, Sejarah Islam Indonesia 1, 2014).

Aceh di bawah kekuasaan 13 Sultan (Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia, 1990), mulai dari Sultan Ali Mughayat Syah (1511 M-1530 M) sampai pada masa Sultan Iskandar Tsani (1636 M-1641 M), terlihat corak kemajuan dalam bidang ekonomi dan politik, pendidikan, dan bidang militer. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ekspansi yang dilakukan masa Sultan

Iskandar Muda yang menanamkan semangat militer Aceh untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayahnya. Pada masa Sultan Iskandar Muda Aceh dalam masa puncak kekuatan militer terkuat pada masanya.<sup>1</sup> Meskipun pada masa Sultan Iskandar pengembangan ilmu pengetahuan juga digerakkan. Namun demikian, kegemilangan pengembangan intelektual di kerajaan Aceh terlihat pada masa Sultanah berkuasa.

Pada abad XVII, Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam yang memperlihatkan bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin suatu pemerintahan (Kamaruzzaman, *Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Sejarah Kerajaan Darussalam Aceh*, 2000). Pada masa pengangkatan Sultanah tersebut, terjadi pro dan kontra yang berdampak pada polemik kekuasaan mengenai pengganti yang sah dalam kedudukan tahta dalam kepemimpinan. Gejala dalam transisi kekuasaan di kerajaan Aceh mendapat penyelesaian setelah dikeluarkannya fatwa dari Makkah yang menyatakan bahwa seorang perempuan sudah tidak boleh menjadi pemimpin. Adapun demikian, keempat Sultanah yang memimpin kerajaan Aceh yaitu: Tajul Alam Syafiyatuddin Syah memerintah tahun 1050 H -1086 H (1641 M - 1675 M), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin, yang memerintah tahun 1080 H - 1088 H (1675 M - 1678 M), Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah, memerintah tahun 1088 H - 1098 H (1678 M - 1688 M), dan Sultanah Kamalat Syah, yang memerintah 1099 H - 1111 H (1688 M - 1699 M).

Pada masa kepemimpinan keempat Sultanah di Kerajaan Aceh yang menuai kontroversi, sehingga menimbulkan gejolak kekuasaan mulai dari Sultanah Tajul Alam sampai Sultanah Keumalat Syah. Jika dilihat dari perjalanan sejarah kerajaan Islam di Aceh, khususnya masa kepemimpinan para Sultanah, telah menunjukkan bahwa otoritas seorang Ratu dalam menentukan arah pemerintahan berorientasi pada pola kepemimpinan yang didasarkan pada strategi dalam pemerintahannya. Terutama dalam pencapaian-pencapaian di berbagai bidang. Adapun demikian dapat dilihat dari segi ilmu pengetahuan yang pada saat itu menunjukkan perkembangan yang

---

<sup>1</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan luas wilayah kekuasaan Aceh serta kerajaan sahabat yang masih berada di bawah kekuasaannya.

cukup signifikan. Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melihat masalah pola kepemimpinan Sultanah Aceh dalam pengembangan ilmu pengetahuan 1614 M - 1699 M. Jika dilihat dari konteks kepemimpinan, pemimpin adalah seorang yang terpilih. Pada masa pemerintahan keempat Sultanah di Aceh tentu hal yang mendasar yang perlu diketahui adalah: *Pertama*, bagaimana suksesi pengangkatan para Sultanah di Kerajaan Aceh Darussalam? *Kedua*, bagaimana pola kepemimpinan yang diterapkan oleh para Sultanah di Kerajaan Aceh Darussalam? *Ketiga*, mengapa kepemimpinan Sultanah menunjukkan penekanan pada pengembangan ilmu pengetahuan?.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang didalamnya memiliki empat tahapan. *Pertama*, heuristik yang dapat dipahami sebagai pencarian sumber. Pencarian sumber dilakukan di berbagai buku, artikel, dan naskah yang terkait dengan kerajaan aceh dan kepemimpinan Sultanah. *Kedua*, kritik atau verifikasi sumber sebagai penggabungan sumber. Setelah diperoleh sumber yang relevan dengan pembahasan, selanjutnya dilakukan kritik sumber yang memetakan antara sumber primer dan sekunder. *Ketiga*, merupakan tahap interpretasi yakni penafsiran dengan menggunakan pendekatan sejarah dan fenomenologi dalam membantu menjelaskan sumber yang di dapat. *Keempat*, adalah *historiografi sebagai tahap akhir dari penulisan sejarah* (Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah, 2011).

## **PEMBAHASAN**

### **Suksesi pengangkatan Sultanah Aceh**

Kerajaan Aceh Darussalam didirikan pada tahun 1516 M oleh Sultan Ali Mughayat Syah setelah berhasil menaklukan wilayah sisa kerajaan Samudera Pasai. Dalam transisi kepemimpinan sampai masa Sultan Iskandar Muda, terlihat perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang militer, ekonomi dan pendidikan. Namun demikian, sangat disayangkan pasca wafatnya Sultan Iskandar Muda 1636 M, estafet kepemimpinan beralih pada Sultan Iskandar Tsani.

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani, terjadi pergolakan politik dalam pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari kemunculan distabilitas politik dan kurangnya kecakapan dalam memerintah. Sehingga, pada akhirnya menempatkan posisi darurat di tengah gencarnya kolonialisme Bangsa Eropa. Setelah terjadi kekosongan dalam pemerintahan, beberapa golongan masyarakat Aceh pro dan kontra terhadap pemilihan pemimpin yang baru, salah seorang ulama yang memiliki peran penting dan berpengaruh adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri, beliau mengadakan musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak menduduki tahta menggantikan Sultan berikutnya.

Setelah proses musyawarah berakhir, diputuskan bahwa pemimpin selanjutnya yang dinobatkan adalah Permaisuri Sultan Iskandar Tsani, yaitu Puteri Safiatuddin. Penunjukkan didasarkan pada perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin asal memenuhi syarat-syarat keagamaan, akhlak dan ilmu pengetahuannya. Pasca peristiwa tersebut, Kerajaan Aceh pernah dipimpin oleh seorang perempuan sampai empat dekade, yaitu: 59 tahun lamanya, mulai dari Sultanah Safiattudin Syah sampai masa Sultanah Ratu Kamalat Syah. Pada masa pemerintahan Sultanah, mereka memperjuangkan kepemimpinan untuk tetap menjadi seorang pemimpin walaupun banyak pertentangan diantara kelompok yang tidak suka dengan kepemimpinan seorang perempuan. Pada dasarnya pengganti sultan Kerajaan Aceh Darussalam merupakan seorang laki-laki yaitu dari putra sulung sultan yang berkuasa saat itu, bila tidak ada putra sulung maka diangkat putranya yang lain. Apabila putra mahkotanya masih di bawah umur maka akan dibentuk sebuah dewan untuk menggantikannya hingga ia mampu untuk memimpin sebuah kerajaan. Biasanya dewan itu akan dipimpin oleh ibunya atau pamannya sampai putra mahkota itu siap untuk memimpin. Apabila tidak ada satu putra mahkota pun yang layak menjadi sultan, maka dapat diangkat seorang perempuan untuk menjadi pemimpin Kerajaan Aceh Darussalam.

Bagi pandangan masyarakat Aceh mengenai kepemimpinan seorang perempuan tidak hanya dalam gejolak politik tapi mereka mempersoalkan tentang agama. Mereka berpendapat bahwa seorang

perempuan tidak sah menjadi seorang pemimpin karena bertentangan dengan hukum Islam karena tidak boleh seorang perempuan menjadi imam shalat. (Kamaruzzaman, Kepemimpinan wanita dalam perspektif sejarah kerajaan aceh darussalam, 2000). Dalam kitab *Taj al-Saratin* sebagaimana dikutip Hadi dalam bukunya yang berjudul *Aceh Sejarah Budaya Dan Tradisi* mengungkapkan bahwa:

“Maka nyatalah perempuan itu tiada dapat dijadikan raja melainkan pada ketika kesukaran soal, jika dalam negeri mati rajanya dan tiada seorang laki-laki daripada anak cucunya dan kaum keluarganya, melainkan perempuan juga, maka dapatkan dijadikan raja perempuan itu, sebab kesukaan segala hamba Allah jangan jadi fitnah negeri” (Hadi, 2010).

Disamping itu kondisi politik dalam Kerajaan Aceh Darussalam pada saat penetapan perempuan menjadi raja yaitu memanas. Dalam menyikapi kondisi seperti ini, para pembesar Aceh dan para ulama yang di bawah pimpinan Syekh Nuruddin ar-Raniry berkumpul untuk membicarakan masalah perempuan menjadi seorang pemimpin. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya para ulama membolehkan perempuan menjadi raja dan diangkatlah Tajul Alam Syafiyatuddin Syah menjadi sultanah pertama (Hasjmy, 59 Tahun Aceh merdeka dibawah pemerintahan Ratu, 1977).

Sebelum itu, penggantian sultan-sultan sebelumnya lebih banyak dikendalikan oleh Orang Kaya. Kelompok elit juga mengontrol beberapa sumber daya alam dari pada sultan, tetapi para Orang Kaya tidak mengontrol akan pemungutan pajak ekspor dan impor. Kedudukan Orang Kaya di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam mempunyai kekuasaan seperti sultan, mereka mempunyai daerah kekuasaan yang berdasarkan keluasan tanah yang dimilikinya. Masyarakat yang berada dalam tanah kekuasaannya pada tunduk dan mematuhi sistem kekuasaan kelompok ini. Dalam membantu dalam kebijakan politiknya, para Orang Kaya saling mendukung, sehingga posisi mereka sangat berbahaya bagi sultan (Ricklefs, 2008). Dalam pemilihan sultan mereka memilih sultan yang sudah tua ataupun sangat muda. Mereka berpendapat bahwa memilih sultan dengan usia begitu akan memiliki kekuasaan yang tidak panjang, sehingga

kekuasaan orang kaya tetap stabil (Surjo, 2001). Tapi setelah Sultan Iskandar Muda mereka tidak lagi mendapat panggung di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam karena sudah tidak mempunyai kebebasan dalam menjalankan politiknya. Sultan Iskandar Muda membatasi kelompok Orang Kaya dan sultan membunuh, menteror dan menjarah dari kalangan Orang Kaya karena membahayakan bagi Sultan Aceh (Reid, 1999).

### **Pola Kepemimpinan Sultanah Aceh**

Perdebatan mengenai pola kepemimpinan perempuan lebih banyak dipicu oleh kelompok politik kaum Wujudiyah. Mereka sangat menentang kepemimpinan seorang perempuan. Setelah ulama besar Aceh, Ar-Raniri menjadi Qadhi Malikul Adil (*Mufti*) Kerajaan Aceh Darussalam, kelompok Wujudiyah tidak memiliki kekuatan politik lagi karena kuatnya pengaruh Ar-Raniri (Fata, 2011). Kelompok Wujudiyah pada dasarnya merupakan kelompok yang di atur oleh golongan politik tertentu yang mempunyai ambisi untuk menguasai pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam. Kelompok Wujudiyah terus berusaha untuk menggulingkan pemerintahan para Sultanah Aceh baik dari Sultanah Tajul Alam Syafiyatuddin Syah sampai sultanah terakhir yaitu Keumalat Syah.

### ***Periode Tajul Alam Syafiyatuddin Syah (1641-1675 M)***

Pada masa Sultanah Tajul Alam Syafiyatuddin Syah, polemik yang dijalankan Kelompok Wujudiyah berhenti ketika Abd Rauf Singkeli ikut andil dalam polemik kekuasaan. Abd Rauf mengatakan bahwa seorang perempuan dapat diangkat menjadi raja dengan beberapa syarat, misalnya urusan pernikahan dan urusan agama dipegang oleh alim keluarga sultan yang bergelar Qadhi Malikul Adil (Zainuddin, 1961). Selain Abd Rauf Singkeli yang mendukung akan kepemimpinan Tajul Alam Syafiyatuddin Syah yaitu ada ar-Raniri. Ia sangat mendukung baik secara agama maupun politis terhadap pemerintahan Tajul Alam (Hadi, 2010).

Sultanah Tajul Alam sangat taat akan syariat Islam, dia bertekad untuk membuktikan bahwa hak dan kewajiban sama dengan kaum pria baik dalam hal politik, ekonomi ataupun dalam hal sosial kecuali

dalam bidang-bidang yang sudah ditetapkan oleh kerajaan. Ulama terkemuka seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniry dan Syekh Abdurrauf Fansury selalu memberi jalan terhadap langkah sultanah dalam melaksanakan penyamaan peran perempuan di Kerajaan Aceh Darussalam. Langkah Sultanah dalam meningkatkan peran perempuan yaitu dengan jalan pendidikan. Sultanah Tajul Alam Syafiyatuddin Syah mewajibkan semua perempuan dalam Kerajaan Aceh Darussalam untuk belajar, supaya kedudukan dan martabatnya dapat ditingkatkan dalam segala kehidupan. Dalam langkah yang diambil oleh Sultanah Tajul Alam Syafiyatuddin Syah, ia memerintahkan kepada pembesar kerajaan untuk membuka pusat pendidikan untuk laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan (Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu, 1997).

Sultanah Tajul Alam juga membebaskan semua perempuan untuk bekerja dalam segala kelembagaan kerajaan dan badan-badan pemerintahan serta sebagai prajurit perang. Dalam masa Sultan Iskandar Muda terdapat prajurit perempuan sebagai divisi pengawal keraton yang disebut Keumala Cahaya yang dipimpin oleh anaknya yaitu Syafiyatuddin (Zakaria, 1972). Prajurit perempuan sebelum kepemimpinan Sultanah Tajul Alam hanya diperuntukkan bagi wanita yang tidak mempunyai suami atau janda. Panglima pertama prajurit Keumala Cahaya adalah Laksamana Malahyat yang terdiri dari wanita janda, tapi setelah Sultanah Tajul Alam menjadi pemimpin kerajaan, aturan bagi wanita janda tidak berlaku lagi karena telah disempurnakan dan terus dilanjutkan. Prajurit itu terdiri dari semua kalangan perempuan, baik janda, bersuami maupun masih gadis (Zakaria, 1972).

Dalam hal perundang-undangan, Sultanah Tajul Alam membuat sebuah kebijakan tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Setiap orang tua yang memiliki anak perempuan yang mau dinikahkan harus memberikan rumah dan hartanya bagi anak perempuannya. Sultanah Tajul Alam beranggapan bahwa anak perempuan tersebut berhak atas rumah dan harta, sehingga tidak ada perselisihan mengenai harta serta menjaga sikap suami jika berkelakuan buruk atas istrinya (Wahyuningroem, 2005).

### ***Periode Sultanah Nurul Alam Naqiyatuddin (1675-1678 M)***

Setelah Tajul Alam Syafiyatuddin Syah meninggal dan digantikan oleh perempuan bangsawan yang bernama Nurul Alam Naqiyatuddin Syah. Selama proses pemilihan dan pengangkatannya terjadi polemik kembali atas kelompok yang tidak menyukai kepemimpinan perempuan. Kelompok Wujudiyah mulai bangkit kembali dengan beberapa usaha yang mereka jalani. Berbagai usaha yang dilakukan Kelompok Wujudiyah misalnya dalam jalur hukum, tapi mereka tidak berhasil karena kuatnya deretan Federasi Tiga Sagi yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Federasi Tiga Sagi dibentuk pada masa Nurul Alam Naqiyatuddin Syah yang ingin merubah tatanan sistem pemerintahan seperti merubah pasal-pasal yang ada dalam sistem perundang-undangan yang disebut *Meukuta Alam*. Dalam hal perubahan sistem pemerintahan, diharapkan mampu membendung polemik kekuasaan yang dilakukan Kelompok *Wujudiyah*, maka ia meningkatkan kedudukannya dalam Kerajaan Aceh Darussalam karena pada masanya ia banyak menghadapi konflik yang ditimbulkan Kelompok *Wujudiyah*.

Pembentukan Federasi Tiga Sagi untuk menghalau kekuatan Kelompok Wujudiyah yang semakin keras usahanya untuk mencampuri pemerintahan para Sultanah Aceh. Kedudukan ketiga panglima Sagi dalam Kerajaan Aceh Darussalam sangat kuat, mereka memberi keputusan dalam pengangkatan atau pemberhentian seorang sultan. Hal ini berdasarkan dalam sistem perundang-undangan yang disempurnakan oleh Sultanah Nurul Alam Naqiyatuddin Syah (Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu, 1997). Selain jalur hukum, mereka melakukan sebuah gerakan bawah tanah yang menyebarkan faham kepada masyarakat Aceh mengenai kepemimpinan seorang perempuan. Mereka berpendapat bahwa perempuan dalam menurut agama itu tidak sah karena sangat bertentangan dengan nilai keagamaan. Selain itu mereka juga tidak patuh terhadap kebijakan yang dijalankan oleh para Sultanah Aceh.

Usaha kelompok *Wujudiyah* dalam menjatuhkan kepemimpinan Sultanah Nurul Alam melalui hukum tidak berhasil karena

pembentukan Federasi Tiga Sagi yang pengaruhnya sangat kuat. Kelompok ini tidak putus asa untuk menjatuhkan kekuasaan sultanah, mereka melakukan pergerakan secara diam-diam menyebarkan faham kepada masyarakat Aceh mengenai tidak sahnya pemimpin perempuan menurut agama dalam memimpin suatu negara. Di samping melakukan kampanye secara diam-diam, mereka juga tidak patuh terhadap peraturan yang ada di kerajaan. Kelompok ini sering melakukan sabotase dan pelanggaran tata tertib kerajaan (Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu, 1997). Setelah satu tahun Sultanah Nurul Alam Naqiyatuddin Syah memimpin kerajaan, mereka membakar ibu kota kerajaan sehingga seluruh isi dari kerajaan seperti Masjid Baitur Rahman, Keraton Darud, pusaka-pusaka kerajaan habis dimakan api dan sumber api tidak diketahui (Said, 1981).

#### ***Periode Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688 M)***

Pada masa Sultanah ketiga yaitu Zaqiyatuddin Inayat Syah tidak begitu diusik oleh Kelompok *Wujudiyah* karena jabatan Qadhi Malikul Adil tetap dipegang oleh Abd Rauf Singkili. Ia merupakan salah satu kunci dari kepemimpinan perempuan di Kerajaan Aceh Darussalam, sehingga pada masa penobatan Zaqiyatuddin Syah hampir tidak mengalami kesulitan, selain itu masih ada kebijakan dari Sultanah Nurul Alam yang memperkuat kedudukan sultanah. Akan tetapi ketika meninggalnya Zaqiyatuddin telah menimbulkan keguncangan politik dalam Kerajaan Aceh Darussalam karena bagi rakyat Aceh, kepemimpinan Zaqiyatuddin menimbulkan sebuah harapan baru. Dimana keadaan pemerintahan pada waktu itu sangat stabil, kekuatan Kelompok *Wujudiyah* juga sangat lemah, Negara bagian yang direbut VOC telah diambil kembali, perekonomian telah kembali sedia kala dan angkatan perang sudah aktif kembali yang sebelumnya pasif. Tapi harapan itu sirna ketika Zaqiyatuddin Inayat Syah meninggal dunia. Maka terjadi sebuah polemik yang hebat dalam Kerajaan Aceh Darussalam, para politisi maupun para kelompok yang tidak menyukai kepemimpinan perempuan berusaha mencalonkan kandidat yang akan menggantikan kepemimpinan perempuan yaitu Syarif Hasyim. Dalam keguncangan politik yang

terjadi, Qadhi Malikul Adil dan juga golongan Tiga Sagi yang statusnya sangat kuat dalam Kerajaan Aceh Darussalam telah memenangkan perseteruan yang terjadi dan memenangkan gejolak perebutan kekuasaan. Maka diangkatlah seorang puteri bangsawan yang bernama Keumalat Syah (Said, 1981).

### ***Periode Sultanah Kamalat Syah (1688-1699 M)***

Pada masa Sultanah Keumalat Syah pertentangan dari Kelompok Wujudiyah tetap terjadi, kelompok ini bangkit kembali dan melakukan berbagai propaganda, dimana timbul fitnah untuk menjatuhkan kekuasaan sultanah. Kebijakan pemerintahan yang dijalankan tetap meneruskan sultanah sebelumnya dari beberapa bidang. Selain itu dalam hubungan bilateral cukup baik dengan meraup keuntungan yang besar dari Inggris yang membuka kantor dagang di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Berakhirnya kekuasaan perempuan dalam memimpin Kerajaan Aceh Darussalam ketika pengaruh terbesarnya yaitu Qadhi Malikul Adil yaitu Abd Rauf Singkili meninggal dunia dan digantikan oleh orang yang tidak menyukai perempuan menjadi raja, selain itu juga ada fatwa dari Mekkah yang melarang akan kepemimpinan perempuan. Walaupun fatwa tersebut palsu karena surat itu hanya dibuat pihak oposisi tapi dengan fatwa tersebut tetap berhasil menggulingkan kekuasaan perempuan yang berakhir selama 59 tahun lamanya.

Dalam polemik kekuasaan yang tidak terelakkan lagi antar kelompok pendukung seperti golongan Tiga Sagi dan kelompok yang tidak lagi menginginkan kepemimpinan perempuan seperti para menteri kerajaan. Golongan tiga sagi memenangkan perseteruan yang terjadi karena posisi Tiga Sagi dalam kerajaan sangat kuat. Selain peran Tiga Sagi yang memenangkan keguncangan politik yang terjadi, ada peran dari Qadli Malikul Adil yaitu Syekh Abd Rauf Syiahkuala yang menenangkan gejolak perebutan kekuasaan. Maka diangkatlah seorang puteri bangsawan yang bergelar Sultanah Keumalat Syah (Said, 1981).

Dalam masa pemerintahan Sultanah Keumalat Syah konflik kepemimpinan perempuan tidak berhenti juga. Berbagai polemik perbedaan pendapat tidak terhindarkan, timbul pula fitnah untuk

menjatuhkan kekuasaan Sultanah Keumalat Syah. Di dalam kekacauan fitnah yang terjadi, Sultanah Keumalat Syah tetap berada dalam kursi kepemimpinannya untuk memperbaiki perekonomian yang ada di Kerajaan Aceh Darussalam.

Selama kepemimpinan keempat sultanah, pengembangan ilmu pengetahuan sangat berkembang dengan pesat seperti pengembangan pusat pembelajaran dan pembuatan sebuah karya. Akan tetapi, dari kondisi politik, ekonomi dan militer mereka tidak bisa menyaingi para sultan sebelumnya khususnya pada masa Iskandar Muda. Terlebih para Sultanah Aceh mampu membawa suatu prestasi bagi Kerajaan Aceh Darussalam, dimana mampu membawa Aceh menjadi pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di ruang lingkup Asia Tenggara (Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu, 1997).

### **Pengembangan Ilmu Pengetahuan Masa Kepemimpinan Sultanah**

Pada masa pemerintahan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin dan Ratu-ratu sesudahnya, terlihat bahwa kekuasaan politik, ekonomi dan militer telah menurun, tetapi pada masa pemerintahan para Sultanah, perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan semakin meningkat. Jika dikomparasikan dengan masa pemerintahan pemimpin-pemimpin sebelumnya (Ali Mughayat Syah sampai Iskandar Tsani), terlihat seperti masa Daulah Abbasiyah I dan II dengan masa Daulah Abbasiyah II dengan IV. Pada masa Daulah Abbasiyah III dan IV kekuasaan militer, politik, ekonomi sudah menurun, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan semakin meningkat.

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dapat dilihat dari adanya pengembangan Jami Baiturrahman (Universitas Baiturrahman) di Banda Aceh bertambah maju, demikian pula pusat-pusat pendidikan di seluruh Aceh, bahkan di segenap penjuru daerah atau wilayah-wilayah yang berada dalam lingkungan Kerajaan Aceh Darussalam, seperti di Ulakan Sumatera Barat, Yan Kedah, Siak Seri Indrapura dan sebagainya.

Jika dilihat dari konteks pengangkatan Sultanah pertama, salah satu ulama yang mengadakan musyawarah adalah Nurrudin Ar-Raniri

yang memiliki pengaruh besar pada masa tersebut. Pasca pemerintahan Sultanah Safiatuddin, kurang lebih tiga ratus orang ulama tidak menyetujui politik yang dijalankan Safiatuddin, sehingga mereka dibiarkan menyebarkan diri ke seluruh wilayah Kerajaan.

Intinya: pada masa kepemimpinan Sultan: Aceh berorientasi pada pengembangan wilayah, dan ekonomi. Adapun demikian, dalam bidang ilmu pengetahuan sudah terlihat tetapi kurang signifikan. Pasca pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh sultan, terjadi transisi kepemimpinan menjadi Sultanah. Pada masa Sultanah kekuatan militer tidak terlalu ditekankan, melainkan pada pemerintahannya berorientasi pada pengembangan intelektual.

## **KESIMPULAN**

Dalam dinamika Kerajaan Aceh Darussalam, adakalanya suatu Kerajaan mengalami pasang surut dalam perjalanan dari suatu kisahnya. Kepemimpinan keempat sultanah tidak bisa seperti para Sultan Aceh yang dapat meraih prestasi dari bidang militer, pemerintahan, politik, perdagangan, ekonomi dan keagamaan. Para sultanah juga tidak bisa mengembalikan kejayaan Aceh seperti pada masa Sultan Iskandar Muda yang unggul dari berbagai bidang seperti ekspansi wilayah, militer dan pemerintahan. Akan tetapi keempat sultanah dapat bisa dikatakan lebih unggul dari para Sultan Aceh dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Para Sultanah Aceh terus mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memelihara dayah-dayah di masyarakat Aceh, sehingga mampu menjadikan Kerajaan Aceh Darussalam menjadi pusat ilmu pengetahuan di kawasan Asia tenggara.

## **REFERENSI**

- Abdurrahman, D. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Fata, I. A. (2011). *Konotasi dan Ideologi Perempuan Dalam Opini Serambi Indonesia Analisis Semiotik*. Jakarta: Tesis Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya.
- Hadi, A. (2010). *Aceh Sejarah Budaya Dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

- Hasjmy. (1977). *59 Tahun Aceh merdeka dibawah pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasjmy. (1990). *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Kamaruzzaman. (2000). Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Sejarah Kerajaan Darussalam Aceh. *Madaniya (03)*, 80.
- Mukarrom, A. (2014). *Sejarah Islam Indonesia 1*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Reid, A. (1999). *Dari Ekspansi Hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680 Jilid II*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ricklefs, H. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Said, M. (1981). *Aceh Sepanjang Abad Jilid I*. Medan: Harian Waspada Modern.
- Surjo, D. (2001). *Agama dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: LKPSM.
- Wahyuningroem, S. L. (2005). Peran Perempuan dan Era Baru di Nanggroe Aceh Darussalam. *29 (1)*, 96.
- Zainuddin. (1961). *Tarich Atceh dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda.
- Zakaria, A. (1972). *Sekitar Kerajaan Atjeh Dalam Tahun 1520-1675*. Medan: Monora.